

Title : Pemuda dan Politik
Author(s) : Muhammad Sheva Februara
Institution : Universitas Lampung
Category : Article
Topics : Youth

PEMUDA DAN POLITIK

Oleh : Muhammad Sheva Februara

Generasi muda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Generasi pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Generasi muda harus diberikan pemahaman bahwa memberikan hak suara dalam pemilu sangat penting, sebab hak suara mereka yang menentukan pimpinan sebagai penentu kebijakan yang nantinya kebijakan itu berdampak kepada mereka juga.

Politik adalah cara untuk menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik juga merupakan alat paling efektif untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan bagi negara. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran yang dilakukan pemuda-pemudi Indonesia, saat mengambil bagian dari perubahan. Partisipasi mereka sangat dibutuhkan.

Peran pemuda dalam partisipasi politik secara yuridis, sudah terpenuhi melalui penentuan batas minimum usia. Namun, hal ini belum cukup karena masih ada kemungkinan keterlibatan pemuda hanya difungsikan oleh sebagian elite partai sebagai kendaraan politik. Pandangan-pandangan politik pemuda akan diarahkan kepada hal konvensional sehingga tidak akan maju. Ini diperparah ketika munculnya fenomena kedinastian dalam tubuh partai politik. Oleh karena itu, perlu sebuah perubahan paradigma berpikir terhadap partisipan politik, yang tidak hanya cukup dengan gagasan akan regenerasi secara semu.

Di remehkan di ruang politik yang eksklusif

Banyak orang di Indonesia memiliki persepsi bahwa usia muda menandakan belum matangnya pengalaman maupun kemampuan seseorang untuk terjun ke dunia politik. Sebagai gambaran, pada 2019, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi oleh beberapa politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menurunkan syarat usia calon kepala daerah. Saat ini, seseorang harus berusia minimal 30 tahun untuk menjadi gubernur, dan 25 tahun untuk jadi bupati atau wali kota.

Anggapan tentang minimnya kompetensi politik kaum muda berakar pada pandangan masyarakat bahwa mereka sebatas bagian atau sumber dari masalah, atau seringkali sebagai 'aset' yakni diperlakukan sebatas subyek yang perlu dibimbing orang dewasa agar mencapai visi atau tujuan tertentu. Budaya senioritas juga memperkuat persepsi ini. Banyak kaum muda telah membuktikan mereka mampu menjadi pendidik, relawan, hingga memberi masukan pada program terkait berbagai macam isu seperti pengurangan risiko bencana, perlindungan anak dan perempuan.

Partisipasi kaum muda dalam politik pun masih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang kelas sosial dan ekonomi menengah-atas dan memiliki privilese untuk mengakses berbagai sumber daya. Politisi muda di DPR atau institusi publik saat ini, misalnya, kebanyakan memiliki kekayaan besar dan berpendidikan tinggi. Banyak yang juga masuk ke politik karena anggota keluarga mereka sebelumnya terlibat di suatu partai. Selain itu, laporan tahun 2017 dari Institute of Development Studies di University of Sussex, Inggris, menemukan bahwa di antara kaum muda Indonesia, partisipasi politik perempuan masih sangat rendah. Mereka mengalami banyak hambatan termasuk norma sosial di Indonesia yang belum mendukung peran aktif perempuan di ruang publik. Padahal, menurut Anne Phillips, profesor ilmu politik di London School of Economics (LSE), Inggris, di dalam sistem politik perlu ada bentuk keterwakilan secara acak yang mencerminkan komposisi berbagai kelompok masyarakat yang ia sebut sebagai 'politics of presence' sehingga kepentingan semua kelompok tersalurkan dengan baik.

Mendorong partisipasi kaum muda yang bermakna

Representasi politik kaum muda itu penting, namun tidak cukup. Untuk mewujudkan partisipasi mereka yang bermakna, ada tiga hal yang juga perlu dilakukan.

Pertama, mengingat kaum muda adalah kelompok yang beragam, partai politik dan pemangku kepentingan perlu lebih banyak membangun ruang yang inklusif dan demokratis untuk mereka. Sistem pemilu dan regenerasi partai politik harus dibenahi untuk menjamin kaum muda bisa terpilih secara demokratis berdasarkan kompetensi mereka tanpa harus mengandalkan privilese atau koneksi keluarga. Namun, selain itu, representasi politik juga tidak hanya tentang jumlah. Pemangku kepentingan perlu lebih sensitif melihat kelompok muda mana yang masih tersisih contohnya perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat beserta tantangan apa saja yang mereka hadapi terkait identitasnya tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pembahasan berbasis riset dan bukti mengenai situasi kelompok rentan, dan memberikan akses partisipasi dan dorongan lebih kepada kelompok tersebut.

Kedua, memastikan penguatan kapasitas orang muda untuk bisa memberikan dampak yang besar di ruang politik. Dukungan yang diberikan dapat berupa upaya membangun kapasitas berpikir kritis serta memperkuat pengetahuan mereka mengenai demokrasi dan hak warga negara. Salah satu upaya ini adalah "Latih Logika", platform kursus daring tentang muatan berpikir kritis yang dikembangkan oleh Communication for Change (C4C). Pelatihan semacam ini bisa mendukung kapasitas kaum muda untuk berkomunikasi di ruang politik formal, serta meningkatkan kemampuan analisis mereka terkait berbagai permasalahan sosial dan politik. Masalah lain yang juga sering ada dalam program bagi kaum muda adalah perspektif yang terlalu berpusat pada visi generasi lama tentang bagaimana partisipasi politik kaum muda yang "ideal" dilakukan.

Ketiga, menciptakan ruang bagi terwujudnya kemitraan antara kaum muda dan kelompok generasi lebih tua untuk saling berbagi kuasa dan transfer ilmu. Salah

satu bentuk upaya ini adalah mendorong adanya dialog lintas-generasi untuk saling belajar dan memahami. Saat ini, misalnya, model Panel Penasihat Muda (Youth Advisory Council) di berbagai lembaga pembangunan banyak diadopsi untuk mendorong partisipasi kaum muda dalam penyusunan program dan kebijakan. Ruang diskusi yang terbuka memungkinkan kaum muda dan generasi di atasnya untuk meruntuhkan tembok-tembok stereotip yang sering disematkan kepada kedua belah pihak, serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik. Dialog perlu dilakukan dengan cara-cara konstruktif dan demokratis yang mengakomodasi kebutuhan dan peran setara antar kedua belah pihak. Membangun partisipasi politik yang bermakna tidak hanya selesai dengan memberikan akses pada kaum muda untuk berpolitik. Kaum muda memerlukan lingkungan yang lebih setara dan inklusif, sehingga bisa memiliki dampak yang lebih luas di tingkat institusi publik maupun partai dan organisasi politik.

Saat ini, banyak pemuda yang apatis terhadap politik di Indonesia. Kepercayaan mereka juga berkurang kepada lembaga politik karena pudarnya nasionalisme dan profesionalisme yang ada pada tubuh birokrasi di Indonesia. Padahal kenyataannya, politik adalah hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Banyak yang beranggapan dunia politik itu kotor, ganas, dan jauh dari kata baik. Nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari politik kian memudar sehingga membuat kepercayaan masyarakat menurun. Di sinilah perpolitikan Indonesia membutuhkan sosok yang dapat membuka gerbang kesempatan untuk golongan pemuda untuk berkarya, bersuara, dan berperan dalam perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Daftar Pustaka :

Zulfikar, A. (2019). Pemuda, Politik dan Masa Depan Indonesia 2045.

Heri, J. (2015). Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15(1), 85-100.

Munawarah, R., & Kristanto, A. A. (2022). Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(1), 32-50.